

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- A. Baso Ence, Iriyanto, 2008, *Negara Hukum & Hak Uji Konstitusionalitas MK (Telaah Terhadap Kewenangan MK)*, Alumni, Bandung.
- Adji, Indriyanto Seno, 2007, *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*, CV. Diadit Media, Jakarta.
- Agustina, Rosa, 2003, *Perbuatan Melawan Hukum*, Program Pascasarjana FHUI, Jakarta.
- Ali, Achmad, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial prudence) Termasuk Interpretasi UU (Legisprudence)*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.
- Ali, Chidir, 2005, *Badan Hukum*, PT Alumni, Bandung.
- Ali, Mahrus, 2016, *Hukum Pidana Korupsi*, UII Press, Yogyakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman, 2011, *Hukum Investasi dan Pasar Modal*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Andi Hamzah dan Andi Zainal Abidin Farid, 2006, *Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik dan Hukum Penitensier*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Anggriani, Jum Hj., 2012, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Jakarta.
- Anoraga, Pandji, 1995, *BUMN Swasta dan Koperasi: Tiga Pelaku Ekonomi*, Dunia Pustaka Jaya, Jakarta.
- Arafat, Wilson, 2006, *Manajemen Perbankan Indonesia Teori dan Implementasinya*, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta.
- Atmadja, Arifin P. Soeria, 1986, *Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan Negara Suatu tinjauan Yuridis*, PT. Gramedia, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik, 2015, *Statistik Kelapa Sawit Indonesia "Indonesian Oil Palm Statistics 2015"*, Badan Pusat Statistik, Jakarta.
- Black, Henry Campbell, 2004, *Black's Law Dictionary*, Eighth Edition, West Group, St. Paul MN, Thompson.
- Busro, Achmad, 2012, *Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUH Perdata*, Pohon Cahaya, Yogyakarta.
- Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, 2008, *Strategi Pencegahan & Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Aditama, Bandung.
- Chazawi, Adami, 2003, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia, Malang.

- Clark, Robert Charles, 1986, *Corporate Law*, Aspen Publisher, USA.
- Collin R Talbot, Christopher Pollit, Janice Caulfield, Amanda Smullen, Pollitt C, 2004, *Agencies: How Governments do Things through Semi-autonomous Organizations*, Palgrave Macmillan, New York.
- Danil, Elwi, 2011, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Djafar, Saidi M., 2008, *Hukum Keuangan Negara, Edisi Pertama*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Djojodirdjo, M.A. Moegni, 1979, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradya Paramita, Jakarta.
- _____, 1982, *Perbuatan Melawan Hukum*, Cet. 2, Pradya Paramita, Jakarta.
- E. Lynn Jr., Laurence, 2006, *Public Management: Old and New*, Routledge, New York & London.
- Emong Sapardjaja, Komariah, 2002, *Ajaran sifat Melawan Hukum Materiil Dalam Hukum Pidana Indonesia (Studi Kasus Tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi)*, Alumni, Bandung.
- E. Utrecht dan Saleh Djindang, 1990, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, PT Ichtiar Baru, Jakarta.
- E. Utrecht, 1959, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Cetakan keenam, PT. Penerbit Balai Buku Ichtiar, Jakarta.
- EY. Kanter dan SR. Sianturi, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Jakarta, Jakarta.
- Farida, Maria, 1998, *Ilmu Perundang-Undangan*, Kanisius, Yogyakarta.
- Freddy Harris dan Teddy Anggoro, 2010, *Hukum Perseroan Terbatas: Kewajiban Pemberitahuan oleh Direksi*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Freddy Susanto, Anthon, 2005, *Semiotika Hukum: Dari Dekonstruksi Teks Menuju Progresivitas Makna*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Fuady, Munir 2002, *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law Dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- _____, 2005, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, Edisi Cet. 2, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2013, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, Edisi Cet. 4, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hadi, Nor, 2013, *Pasar Modal: Acuan Teoretis dan Praktis Investasi di Instrumen Keuangan Pasar Modal*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Hafidz A., Jawade, 2013, *Korupsi dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara (HAN)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Halim, Abdul, 2015, *Analisis Investasi*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

- Hamidi, Jazim, 1999, *Penerapan Asas-asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Layak (AAUPL) dilingkungan Peradilan administrasi di Indonesia (Upaya Menuju "Clean and Stable Government")*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hamzah, Andi, 2005, *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan internasional*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____, 2005, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia & Perkembangannya*, Soft Media, Medan.
- Hanafi Amrani, Ayu Izza Elvani, Iqra Ayatina Yasinta, 2017, *Esensi Keberadaan Pasal 4 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Implementasinya dalam Praktek Penegakan Hukum*, Laporan Penelitian Kolaboratif, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Hanafi, Mamduh M., 2012, *Manajemen Risiko*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Harahap, Yahya, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Cetakan Kedua, Penerbit Alumni, Bandung.
- Harjono, Dhaniswara K., 2007, *Hukum Penanaman Modal*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hiariej, Eddy O.S., 2009, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta.
- _____, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Cahaya Atmapustaka, Yogyakarta.
- Husnan, Suad, 2014, *Pengertian dan Konsep-Konsep Dasar Keuangan*, EKMA4213/Modul 1, Universitas Terbuka, Jakarta.
- Jamin Ginting & Hamid Chalid, 2010, *Kapita Selekta Kasus-Kasus Korupsi di Indonesia: Putusan-Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (volume IV)*, Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI), Jakarta.
- Kusumaatmadja, Mochtar, tanpa tahun, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung.
- Lailam, Tanto, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara*, Prudent Media, Yogyakarta.
- Latif, Abdul, 2016, *Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan ke-2, Prenada Media Group, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F., 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana yang Berlaku di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Lamintang, P.A.F., 1984, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- Lubis, T. Mulya, 1987, *Hukum dan Ekonomi Beberapa Pilihan Masalah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

- Machmud, S., 2012, *Problematika penerapan delik formal dalam perspektif penegakan hukum pidana lingkungan di Indonesia, fungsionalisasi asas ultimum remedium sebagai pengganti asas subsidiaritas*, CV Mandar Maju, Bandung
- Makawimbang, Hernol F., 2014, *Kerugian Keuangan Negara*, Thafa Media, Yogyakarta.
- Manan, Abdul, 2014, *Peran Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Marbun, SF dkk, 2002, *Dimensi-Dimensi HAN*, UII Press, Yogyakarta.
- Maria SW Sumardjono, 2019, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum, Edisi Revisi, Cetakan ke-6*, Kencana Pranadamedia, Jakarta.
- Matutu, Mustamin DG, Abdul Latif, Hikmawati Mustamin, 1999, *Mandat, Delegasi, Atribusi dan Implementasinya di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.
- Melkianus Albin Tabun, et.al., 2023, *Manajemen Risiko Bisnis Era Digital (Teori dan Pendekatan Konseptual)*, Seval Literindo Kreasi, NTB.
- Mertokusumo, Sudikno, 1996, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- M. Hadjon, Phillipus, 1998, *Tentang Wewenang, Makalah Penataran Hukum Administrasi Negara*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.
- M. Yahya Harahap, 2000, *Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, PT. Sinar Grafika, Jakarta
- Moeljatno, 1987, *Asas Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2014, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Mulyadi, 2010, *Sistem Akuntansi*, Edisi Ketiga, Salemba Empat, Jakarta.
- Mulyadi, Lilik, 2007, *Asas Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Pasca Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003*, Penerbit PT. Alumni, Bandung.
- _____, 2012, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Alumni, Bandung.
- _____, 2013, *Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tipikor pada Putusan MA, Majalah Mahkamah Agung*, Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI, Jakarta.
- Mulyana, Asep N., 2018, *BJR, Praktik Peradilan Terhadap Penyimpangan Dalam Pengelolaan BUMN/BUMD*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Munaf, Yusri, 2016, *Hukum Administrasi Negara*, Marpoyah Tujuh, Pekanbaru.

- Nababan, Hotasi, 2015, *Hukum Tanpa Takaran: Penjara Korupsi Bagi Korban Penipuan*, Q-Communication, Jakarta
- Nasution, Bismar, 2009, *Prinsip Good Corporate Governance pada Perseroan*, USU Press, Medan.
- Nawawi Arief, Barda, 2010, *Perkembangan Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia (Perspektif Perbandingan Hukum Pidana)*, Badan Penerbit Undip, Semarang.
- Nirwanto, D Andhi, 2013, *Dikotomi Terminologi Keuangan Negara Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi*, Aneka Ilmu, Jakarta.
- Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, 2007, *Investasi pada Pasar Modal Syariah*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Patrik, Purwahid, 1994, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian dan Dari UU)*, Mandar Maju, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Pranda Media, Jakarta.
- Philipus M Hadjon, Tatiek Sri Djatmiati, G.H. Addink, J.B.J.M. Ten Berge, 2011, *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*, Gajahmada University Press, Yogyakarta.
- Pradjonggo, Tjandra Sridjaja, 2010, *Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Indonesia Lawyer Club, Jakarta.
- Pramono, Widyo, 2016, *Pemberantasan Korupsi dan Pidana Lainnya, Sebuah Perspektif Jaksa & Guru Besar*, Kompas Media Nusantara, Jakarta.
- Prasetyo, 2014, *Dilema BUMN "Benturan Penerapan BJR (BJR) dalam Keputusan Direksi BUMN"*, Rayyana Komunikasindo, Jakarta.
- Prasetyo, Teguh, 2017, *Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Depok.
- Prodjodikoro, Wiryono 1990, *Azas-Azas Hukum Perdata*, Cetakan Kedelapan, PT Sumur, Bandung.
- _____, 1973, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, PT Sumur, Bandung.
- Rajaguguk, Erman, 2011, *Butir-butir hukum ekonomi*, Lembaga studi Hukum dan Ekonomi FH UI, Jakarta
- Ramadhan A., Muhammad, 2021, *Hukum dan Teknologi: Restitutio in Integrum Pada Aspek Transparansi Sosialisasi Produk Hukum Berbasis Teknologi Digital Sebagai Bentuk Kesadaran Hukum Masyarakat*, Semarang: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
- Remmelink, Jan, 2003, *Hukum Pidana (Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab UU Pidana Indonesia)*, Gramedia Pustaka, Jakarta.
- Rido, Ali, 2004, *Badan Hukum Dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, PT Alumni, Bandung.
- Ridwan, HR, 2016, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Rajawali Press, Jakarta.
- _____, 2003, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta, UII Press.

- Roger LeRoy dan Gaylod A. Jentz, 2012, *Business Law Today, Text and Cases*, South Western Cengage Learning, Mason.
- Romli Atmasasmita dan Kodrat Wibowo, 2016, *Analisis Ekonomi Mikro tentang Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Ke-1, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- Romli Atmasasmita, 2000, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- R. Wiyono, 2009, *Pembahasan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, , Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Scholten, Paul, 2003, *Struktur Ilmu Hukum*, Alih Bahasa B. Arief Sidharta, Alumni, Bandung.
- Saleh, Roeslan, 1987, *Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta,
- Samsul, Mohamad, 2006, *Pasar Modal dan Manajemen Portofolio*, Erlangga, Jakarta.
- Saragih, Djasadin, 1985, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Airlangga University Press, Surabaya.
- Sastrawidjaja, S., 1995, *Hukum Pidana, Asas Hukum Pidana sampai dengan Alasan Peniadaan Pidana*, Armico, Bandung.
- Sembiring, Sentosa, 2011, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*, Cetakan III, CV Aulia, Bandung.
- Seno Adji, Indriyanto, 2001, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Kantor Pengacara & Konsultasi Hukum “Oemar Seno Adji & Rekan”, Jakarta
- _____, 2016, *Scientific Evidence dalam Proses Pembuktian Perkara*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- _____, 2006, *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara & Hukum Pidana*, Diadit Media, Jakarta
- Setiawan Boen, Hendra, 2008, *Bianglala BJR*, Tatanusa, Jakarta.
- Setiawan, R., 1987, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Cetakan Keempat, Bina Cipta, Bandung.
- Setiawan, R., 1999, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Putra A. Dardin, Bandung.
- Setiawan, R. 1978, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Putra Abardin, Bandung.
- Setiawan, R., 1979, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung.
- Setiawan, R., 1982, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Alumni, Bandung.
- Shinta Agustina, Ariehta Eleison, Alex Argo Hernowo, Ronni Saputra, 2016, *Penafsiran Unsur Melawan Hukum Dalam Pasal 2 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, LeIP (Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan), Jakarta.
- Sihombing, Jonker, 2009, *Tanggung Jawab Yuridis Bankir Atas Kredit Macet Nasabah*, Alumni, Bandung.

- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soepardi, Eddy Mulyadi, 2009, *Memahami Kerugian Keuangan Negara Sebagai Salah Satu Unsur Tindak Pidana Korupsi*, Refika Aditama, Bandung.
- Soerjono Soekanto dan Siti Mamudji, 2009, *Penelitian Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan 11, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Subekti, 2020, *Hukum Perjanjian*, Cetakan Keduapuluh, Internusa, Jakarta.
- Sudarto, 2010, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- _____, 2009, *Hukum Pidana I*, Cetakan Ketiga, Penerbit Yayasan Sudarto, Semarang.
- Suhendar, 2015, *Konsepsi Kerugian Keuangan Negara: Pendekatan Hukum Pidana, HAN, dan Pidana Khusus Korupsi*, Setara Pers, Malang.
- Summaryanto, A. Djoko, 2009, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*, Prestasi Pustakaraya, Jakarta.
- Sutopo, H.B., 1988, *Metode Penelitian Kualitatif Bagian II*, UNS Press, Surakarta.
- Syarani, Riduan, 2004, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung.
- Tandelilin, Eduardus, 2012, *Dasar-Dasar Manajemen Investasi*, EKMA5312/MODUL 1, Universitas Terbuka, Jakarta.
- Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah, 2005, *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Deskriminalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Teddy J. Sitepu et.al., 2014, *Satu Dekade Penganggaran Berbasis Kinerja di Indonesia: Rekomendasi Kebijakan untuk Perbaikan*, Paramadina Public Policy Institute, Jakarta.
- Timothy L. Hall, 2004, *The U.S. Legal System*, Salem Press, California.
- Tjiptono Darmadji dan Fakhrudin, 2001, *Pasar Modal di Indonesia: Pendekatan Tanya Jawab*, Salemba Empat, Jakarta.
- Tom Christensen & Per Laegreid, 2006, *Autonomy and Regulation: Coping with Agencies in the Modern State*, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, UK & Northampton, MA, USA.
- Tuanakotta, Theodorus M., 2010, *Akuntansi Forensik dan Audit Investigasi*, Salemba Empat, Jakarta.
- _____, 1983, *Teori Akuntansi, Buku Satu*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Utrecht, E, 1960, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, FH Unpad, Bandung.
- Wahyuni, Fitri, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang.

- Widjaja, Gunawan, 2008, *Risiko Hukum Pemilik, Direksi dan Komisaris*, Forum Sahabat, Jakarta
- W. Riawan Tjandra, 2006, *Hukum Keuangan Negara*, Penerbit PT Grasindo, Jakarta.
- Wiyono, R., 2005, *Pembahasan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Zega, Kevin D., 2020, *Titik Singgung Tindak Pidana Korupsi Dengan Administrasi Negara*, Mappi, Depok.

B. Jurnal, Hasil Penelitian Ilmiah (Skripsi, Tesis, Disertasi), Dokumen Petunjuk Pelaksanaan

Skripsi, Tesis, dan Disertasi

- Arifin, Ina R, 2016, *Kajian Yuridis Kedudukan Kredit Macet pada Bank BUMN sebagai Kerugian Keuangan Negara Pasca Putusan MK No. 62/PUU-IX/2013*, Tesis, Program Studi Magister Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Diah Ekawati, Suriasih, 2016, *Pengaruh Risiko Sistematis dan Risiko Tidak Sistematis Terhadap Return Saham Sektor Pertambangan dan Sektor Aneka Industri Yang Terdaftar di BEI Tahun 2010-2014*, Tugas Akhir, Program Magister Manajemen, Universitas Terbuka, Jakarta.
- Dirgantara, Putra L., 2021, *Analisis Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Tesis, Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau, Pekanbaru Riau.
- Hermanto, Bambang, 2017, *Analisis Yuridis Tanggung Jawab Direksi Atas Kerugian Yang ditanggung Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) Akibat Wanprestasi Pihak Mitra (Studi Kasus Putusan MA No. 337/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.)*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- Ina R Arifin, 2016, “Kajian Yuridis Kedudukan Kredit Macet pada Bank BUMN sebagai Kerugian Keuangan Negara Pasca Putusan MK No. 62/PUU-IX/2013”, Tesis Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta.
- Julian Noor, Hendry, 2018, *Kerugian Keuangan Negara Dalam Pengelolaan BUMN Berbentuk Perseroan Terbatas, Perspektif Hukum Bisnis dan Tindak Pidana Korupsi*, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Parmono, Budi, 2011, *Penyalahgunaan Wewenang dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.
- Permana, Pinos, 2016, *Penerapan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam menangani Tindak Pidana Perbankan pada Bank BUMN dalam Rangka*

Pemulihan Kerugian keuangan Negara, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada, Jakarta.

Sudiyatno, Bambang, 2010, *Peran Kinerja Perusahaan Dalam Menentukan Pengaruh Faktor Fundamental Makroekonomi, Risiko Sistematis, dan Kebijakan Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empirik Pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia)*. Disertasi, Universitas Diponegoro, Semarang.

Dokumen Petunjuk Pelaksanaan

Badan Pusat Statistik, 2015, *Statistik Kelapa Sawit Indonesia “Indonesian Oil Palm Statistics 2015”*, Badan Pusat Statistik, Jakarta.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan, 2008, *Serial Edukasi Keuangan Negara, Edisi 01*, Direktorat Sistem Perbendaharaan Ditjen Perbendaharaan, Jakarta.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan, 2013, *Manual Pengelolaan Satker BLU Bidang Pengelolaan Dana*, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Jakarta.

Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU, 2020, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kemenkeu, *Handbook Memahami BLU*, Jakarta.

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, 2017, *Sawit dan Kebijakan Industrialisasi Sawit Menuju 2050*, Tim Riset Palm Oil Agribusiness Strategic Institute (PASPI)

Indriyanto Seno Adji, “*Asas Perbuatan Melawan Hukum Materiel dan Masalahnya Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonrsia*”, Makalah disampaikan pada seminar tentang Asas-Asas Hukum Pidana Nasional, Semarang 26-27 April 2004

Kemenkeu, 2015, Naskah Akademik BLU Lembaga Pengelola Dana Kelapa Sawit Berkelanjutan, Jakarta.

Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), 2006, *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*, KNKG, Jakarta.

Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Kinerja Teknis BLU BPDPKS Tahun 2016, 2018, dan 2019

Laporan Tahun (*Annual report*) BPDPKS Tahun 2015 s.d Tahun 2021, <https://www.bdpd.or.id/annual-report-bdpdps/>

Kementerian Keuangan, 2022, *Bunga Rampai BLU: Konsep, Kebijakan, dan Implementasi*, Direktorat Sitem Perbendaharaan, Ditjen Perbendaharaan, Kemenkeu, Jakarta.

OECD, 2018, *OECD Best Practices for Performance Budgeting*, GOV/PGC/SBO (2018)7, 23 November 2018, Paris: OECD Publishing.

OECD, 2005, *Modernizing Government: The Way Forward*, OECD Publishing, Paris.

Rencana Bisnis Anggaran BDP PKS Tahun 2023, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kemenkeu, Jakarta.

Sekretariat Jenderal Kemenkeu, 2019, *Kelola Risiko, Manfaatkan Peluang*, Buletin Kinerja Kemenkeu Edisi XL/ Semester II 2019, Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal Kemenkeu, Jakarta.

Jurnal Ilmiah

Abizar Y., M., *et.al.*, “*PELINDUNGAN Hukum Keputusan Bisnis Direksi BUMN Melalui BJR Doctrine*”, Jurnal Jurisprudence Vol. 10, No.1, 2020.

Affandhi, Frans., Bismar Nasution, Mahmul Siregar, dan Mahmud Mulyadi, “*Business Judgement Rule Dikaitkan Dengan Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Direksi BUMN Terhadap Keputusan Bisnis Yang Diambil*”, USU Law Journal. Vol. 4. No. 1 Januari 2016.

Aisha, R and Muhammad, Z.I.J., “*Agencification in Pakistan: A Comparative Study of Regulatory and Service Delivery Agencies*”, Paper for the EGPA Conference, 7-10 September 2010, Toulouse, France SG6: Governance of Public Sector Organizations, 2010.

Akbar, Muhammad, *Penerapan Prinsip-prinsip New Public Management dan Governance Dalam Reformasi Administrasi*, Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Reformasi, Vol.5 No.2 Tahun 2015.

Ali Tafriji Biswan dan Iklima Devi Grafitanti, “*Memaknai Kembali Penganggaran Berbasis Kinerja Berdasarkan Studi Implementasi Penganggaran Sektor Publik*”, Jurnal Manajemen Perbendaharaan Vol 2 No 1 (2021) 30 Juni 2021.

Andi Wibowo, Richo, “*when anti-corruption norms lead to undesirable results: learning from the Indonesian experience*”, Crime Law and Social Change 70(3): 2018.

Arne Jon Isachsen dan Thorvaldur Gylfason, “*Putting Oil Profits to Global Benefit*”, article Finance and Development by International Monetary Fund, December 2022.

Asimow, Michael, “*Five Models of Administrative Adjudication*”, The American Journal of Comparative Law, Volume 63 No. 3, 12 June 2015.

Basuki Minarno, “*Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*”, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Laksbang Mediatama Pressindo, 2008, dalam <http://e-journal.uajy.ac.id/10708/2/1HK10815.pdf>

Bishop, William, “*A Theory of Administrative Law*”, The Journal of Legal Studies Volume 19 No. 2, 1990.

Blondiau, Thomas, *et.al.*, “*Comparison of Criminal and Administrative Penalties for Environmental Offenses*”, European Journal of Law and Economics Volume 39 No. 1, 2015.

- Budi P., Arif, *“Agencification in Asia: Lesson from Thailand, Hong Kong, and Pakistan”*, Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik (JKAP), Vol. 21 (1), May 2017.
- Cho, Byung-Sun, *“Administrative Penal Law and Its Theory in Korea and Japan: A Comparative Point of View”*, Tilburg Law Review Volume 2 No. 3, 1993.
- Desiputri Hadi, Shigeko *et.al.*, *“Prinsip BJR Dalam Pertanggungjawaban Hukum Direksi BUMN yang Melakukan Tindakan Investasi yang Mengakibatkan Kerugian”*, Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Unpad, Vol. 4 No. 2 Juni 2021.
- Donny MP dan Sintong A., *“Memahami BLU Sebagai Ujung Tombak Pemerintahan Dalam Pelayanan Publik”*, Indonesian Treasury Update Vol. 4 No. 6 Periode November-Desember 2019.
- Erman Rajagukguk, *“Pengelolaan Perusahaan Yang Baik: Tanggung Jawab Pemegang Saham, Komisaris, dan Direksi”*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 26 No. 3, Tahun 2007.
- Fatikha, A., *“Reinventing Government dan Pemberdayaan Aparatur Pemerintah Daerah”*, Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah Vol. VIII Edisi 1, 2017.
- Flora P. K. dan Michael Kuntag, *“Analisis Yuridis Perbuatan Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi Terkait Penyalahgunaan Wewenang”*, Jurnal Lex Crimen Vol. XI/No.1/Jan/2022
- Friday F.N. and Kehinde D.A., *“Agencification of Public Service Delivery in Developing Societies: Experiences of Pakistan and Tanzania Agency Models”*, Africa's Public Service Delivery and Performance Review; Cape Town Vol. 2, Iss. 3, (2014).
- Healy Ubelaker, Michele, *“Director Liability Under the BJR: Fact or Fiction”*, Jurnal 35 Sw L.J. 775, 1981.
- Hee Soun Jang and Myungjun Kwon, *“Enterprising Government: The Political and Financial Effects of fee-supported municipal services”*, University of North Texas and California State University Fullerton, Journal of Public Administration Quarterly Vol. 38 No.2 (Summer 2014) Published by SPAEF, 2014.
- Hood, C., *“A Public Manage-Ment for All Seasons?”*, Public Administration an international quarterly, Volume 69 issue 1, first Published March 1991, 2001.
- Hood, C., 1995, *“the “new public management” in the 1980s: Variations on a Theme”*, Accounting, Organizations and Society, Volume 20, Issues 2-3 February-April 1995.
- Ibrahim R., *“Landasan Filosofis dan Yuridis Keberadaan BUMN: Sebuah Tinjauan”*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 26 No.1 Tahun 2007.
- Ika Maya Sari dan Nur Arvah Tamrin, *“Pengaruh Penerapan Good Government Governance dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas*

- Informasi Laporan Keuangan (Studi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari*”, Jurnal Akuntansi dan Keuangan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, UHO, Vol. 1 No. 1, 2016.
- Januarsyah, M.P. Zenno., 2017, “*Penerapan Prinsip Ulmtimum Remedium dalam Tindak Pidana Korupsi (Kajian Putusan No. 2149 K/PID.SUS/2011)*”, Jurnal Yudisial Vol. 10 No. 3 Desember 2017.
- Juliani Henny, “*Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan Pejabat Lain*”, Laporan Hasil Penelitian Fakultas Hukum Undip, Semarang, 2017.
- Juliani, Henny, “*Eksistensi BLU Sebagai Penyelenggara Pelayanan Publik*”, Adminitrative Law & Governance Journal Vol. 1 Edisi Khusus 1 2018.
- Juliani, Henny, “*Penyelesaian Kerugian Keuangan Negara*”, Jurnal Masalah-Masalah Hukum Universitas Diponegoro Jilid 39 No.1 Maret 2010.
- Kharisma, Bayu, “*Good Governance Sebagai Suatu Konsep Dan Mengapa Penting Dalam Sektor Publik Dan Swasta (Suatu Pendekatan Ekonomi Kelembagaan)*”, Universitas Padjajaran: Jurnal Buletin Studi Ekonomi Vol. 19 No 1 Februari 2014.
- Kristianto, D., “*Investasi Pemerintah dalam Bentuk Kekayaan Negara Dipisahkan*”, Artikel, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu, 2021.
- Laking., R., “*Agencies: Their Benefits and Risks*”, OECD Journal on Budgeting Volume 4 No. 4, 2015.
- Lestari, Sartika N., “*BJR Sebagai Immunity Doctrine Bagi Direksi BUMN di Indonesia*”, Jurnal Notarius, Edisi 08 No. 2 September 2015.
- M. Hadjon, Philipus, “*Tanggung Jawab Jabatan dan Tanggung Jawab Pribadi Atas Tindak Pemerintahan*”, Makalah, dalam Pelatihan Hakim Tindak Pidana Korupsi, diselenggarakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, Bogor, tanggal 25 April s/d 12 Mei 2010.
- Magnus Fredriksson & Josep Pallas, “*New Public Management*”, The International Encyclopedia of Strategic Communication (IESC), University of Gothenburg & Uppsala University, Agustus 2018.
- Mahyani, Ahmad, “*Tanggung Jawab Pidana Direksi BUMN yang Merugi*”, Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, Volume 2, No. 1, Februari 2019.
- Mantili, Rai, “*Ganti Kerugian Immateriil Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Praktik: Perbandingan Indonesia Dan Belanda*”, Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure: Kajian Ilmiah Hukum, Volume 4 No. 2, September 2019.
- Mardhiyah, Ainun, “*Peranan Analisis Return dan Risiko dalam Investasi*”, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Volume 2 No. 1 April 2017.
- Marganda A., Dinoroy, “*Kompleksitas Penegakan Hukum Administrasi dan Pidana di Indonesia*”, Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 18 No. 1, Maret 2021.

- Marwan Efendi, *"Pengertian Keuangan Negara dari Perspektif HAN, Perdata dan Pidana"*, Makalah, Workshop Pembuktian Unsur Kerugian Keuangan Negara dan Perhitungannya dalam Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, 11 Desember 2007.
- Nanda Lestari, Sartika, *"BJR Sebagai Immunity Doctrine Bagi Direksi BUMN di Indonesia"*, *Jurnal Notarius*, Edisi 08 No. 2 September 2015.
- Osborne, David, *"Reinventing Government"*, Public Productivity & Management Review, Vol. 16, No. 4, Fiscal Pressures and Productive Solutions: Proceedings of the Fifth National Public Sector Productivity Conference, Summer, 1993.
- Priyono, Joko FX, 2002, *"Summary the State and the Rule of Law in a Mixed Economy (Negara dan Rule of Law Dalam Sistem Ekonomi Campuran oleh W. Friedman)"*, Makalah disampaikan pada Diskusi Reguler Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Tanggal 1 April 2002.
- Puspawati, A.A., *"Penerapan New Management (NPM) di Indonesia (Reformasi Birokrasi, Desentralisasi, Kerjasama Pemerintah dan Swasta Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik)"*, *Jurnal Ilmu Administrasi Publik* Vol. 1 No. 01 bulan April 2016.
- Rainey, H., G., & Jung, Ch., S., *"Extending goal ambiguity reserach in goverment: from organizational goal ambiguity to programme goal ambiguity"*, In R. Walker, G. Boyne, & A. Brewer (Eds.), *Public Management and Performence. Research Directions*. Cambridge: Cambridge University Press., 2010.
- Salam, Syukron, *"Perkembangan Doktrin Perbuatan Melawan Hukum Penguasa"*, *Jurnal Nurani Hukum* Vol. 1 No. 1 Desember 2018.
- Seno Adji, Indriyanto, *"Perspektif Ajaran Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi"*, *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Volume 25 No. 4, Oktober 2007.
- Siahaan, Maruarar, *"Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Hukum Konstitusi"*, *Jurnal Hukum*, No.3 Vol. 16, Juli 2009.
- Solechan, *"Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dalam Pelayanan Publik"*, *Administrative Law & Governance Journal*, Volume 2 Issue 3, August 2019.
- Stroinska, Ewa, *"New Public management as a Tool for Changes in Public Administration"*, *Journal of Intercultural Management Sciendo*, Vol. 12 No.4, December 2020.
- Sujanto, Siswo, *"Tinjauan Kerugian Negara Dari Sudut UU Keuangan Negara Dalam Penyelesaian Kasus Korupsi"*, Disampaikan dalam Seminar yang diselenggarakan oleh Ditjen Perbendaharaan Departemen Keuangan RI, pada tanggal 25 Nopember 2008.
- Sulaeman, Eman, *"Kebijakan Penggunaan Sanksi Pidana dalam PerUUan Hukum Administrasi"*, *Wahana Akademika* Volume 1 No. 1 2014.
- Syukri Asy'ari, et.al., *"Model dan Implementasi Putusan MK Dalam Pengujian UU (Studi Putusan Tahun 2003-2012)"*, Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengkajian

Perkara Pengelolaan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Kepaniteraan dan Sekertariat Jenderal MK RI, 2012.

T. White, David, *"Delaware's Role in Handling the Rise of Dual-, Multi-, and Zero-Class Voting Structure"*, Delaware Journal of Corporate Law, Wilmington Vol. 45, Iss.1 (2020).

Tjoanda, M., *"Wujud Ganti Rugi Menurut Kitab UU Hukum Perdata"*, Jurnal SASI Volume 16 No. 4 Bulan Oktober - Desember 2010.

Tommy Sadi, *"Kajian Hukum Tentang Penerapan prinsip Pelayanan Publik Berdasarkan UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik"*, Jurnal Lex et Societatis, vol V (Agustus 2017).

Weyembergh, Anne & Nicolas Joncheray, *"Punitive Administrative Sanctions and Procedural Safeguards: A Blurred Picture that Needs to be Addressed"*, New Journal of European Criminal Law Volume 7 No. 2, 2016.

C. Peraturan PerUUan

UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab UU Hukum Pidana.

Kitab UU Hukum Perdata.

UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Negara.

UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

UU No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN.

UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

PP No. 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah.

PP No. 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah.

PP No. 23 Tahun 2005 jo. PP No 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan BLU.

PP No. 6 Tahun 2000 tentang Perusahaan Jawatan (Perjan)

PP No. 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan

- PP No. 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
- PP No. 49 Tahun 2011 tentang Perubahan PP No. 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah.
- PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Perpres No. 12 Tahun 2019 tentang Dana Pendidikan.
- Perpres No. 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025
- Perpres No. 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit.
- Perpres No. 12 Tahun 2019 tentang Dana Pendidikan.
- Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan No. 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara.
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. PER-15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disempurnakan melalui Peraturan Menteri PAN dan RB No. 20 Tahun 2010 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2010-2014.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.
- PMK No. 80/OMK.05/2016 tentang Standar Pelayanan Minimum BPDPKS
- PMK No. 131/PMK.01/2015 tentang Pedoman Penyusunan Proses Bisnis, Kerangka Pengambilan Keputusan, dan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kemenkeu
- PMK No.-222/PMK.05/2021 tentang Manajemen Risiko Pengelolaan Keuangan Negara
- Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/2017 tentang Pedoman Kerja Sama BUMN.
- Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 Jo. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*)
- PMK 84/PMK.05/2017 tentang Penggunaan Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit BLU BPDPKS
- PMK No. 238/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Endowment Fund Dan Dana Cadangan Pendidikan
- PMK No. 129 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan BLU
- PMK No. 91 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PMK No. 193/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Penelaahan dan Penetapan Alokasi Anggaran Bagian

Anggaran Bendahara Umum Negara, dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara

PMK No. 113/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPD PKS

PMK No. 190/PMK.01/2018 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku PNS di Lingkungan Kemenkeu.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

Keputusan Menteri Keuangan No. 714/KMK.05/2015 tentang Pembentukan Dewan Pengawas Pada BPD PKS

Keputusan Menteri Keuangan No. 36/KMK.01/2014 tentang Cetak Biru Transformasi Kelembagaan Kemenkeu Tahun 2014-2025

Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. KEP-206/PB/2019 tentang Standar Operasional Prosedur BPD PKS

Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. KEP-67/PB/2021 tentang Standar Operasional Prosedur BPD PKS

Keputusan Direktur Utama BPD PKS No. KEP-628/DPKS/2019 tentang Pedoman Perilaku dan Etika (*Code of Conduct*) pada BPD PKS

Risalah Rapat Komite Pengarah BLU BPD PKS periode 2015-2021

Peraturan Direktur Utama BPD PKS No. PER-2/DPKS/2019 jo. PER-3/DPKS/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Investasi.

Peraturan Direktur Utama BPD PKS No. PER-4/DPKS/2020 jo. No. PER-15/DPKS/2021 tentang Kebijakan dan Strategi Investasi.

Lampiran I.01, Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua l, Kerangka Konseptual,

PMK No. 53 Tahun 2020 tentang Tata Cara Investasi Pemerintah

D. Putusan Pengadilan

Putusan MA No. 81 K/Kr/1973 tanggal 16 Desember 1976

Putusan MA No. 97 K/Kr/ 1973 tanggal 17 Oktober 1973

Putusan Mahkamah Agung No. 417 K/Pid.Sus/2014

Putusan Mahkamah Agung No. 121 K/Pid.Sus/2020 tanggal 9 Maret 2020

Putusan Mahkamah Agung No. 121 K/Pid.Sus/2020 tanggal 9 Maret 2020

Putusan Mahkamah Agung RI No. 72/K/1970 tanggal 27 Mei 1972

Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016

Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016

Putusan MK No. 48/PUU-XI/2013 dan No. 62/PUU-XI/2013

Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto No.: 174/Pid.B/2009/PN.Pwt. Tanggal 27 Agustus 20

Putusan tanggal 24 Juli 2006 No. 003/PUU-IV/2006.

Keputusan MK Tahun 2006 Atas Judicial review Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 Perkara No.:003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006.

E. Artikel Internet

Andry Triyanto Tjitra, “Deretan Fakta di Balik Vonis Nihil Benny Tjokro dalam Kasus Asabri yang Rugikan Negara Rp 22,7 Triliun”, <https://bisnis.tempo.co/read/1679083/deretan-fakta-di-balik-vonis-nihil-benny-tjokro-dalam-kasus-asabri-yang-rugikan-negara-rp-227-triliun>, diakses tanggal 6 Februari 2023 pukul 05.23 wib

Aulia Keiko, “Sawit dan Dalih Negara Maju”, <https://koran-jakarta.com/sawit-dan-dalih-negara-maju?page=all>, diakses tanggal 12 Januari 2023 pukul 05.40 WIB

Bantolo, “BPDPKS Sudah Realisasi Penyaluran Dana PSR seluas 273.666 Ha”, <https://www.agrofarm.co.id/2023/01/hingga-2022-bpdps-telah-salurkan-dana-psr-capai-rp752-triliun/>, diakses tanggal 23 Maret 2023 pukul 11.12 WIB

Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian, “Kontribusi Minyak Kelapa Sawit Indonesia Mengatasi Krisis Pangan Global”, <https://ditjenbun.pertanian.go.id>, diakses tanggal 11 November 2022 pukul 10.00 WIB

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, 2017, “Sawit dan Kebijakan Industrialisasi Sawit Menuju 2050”, Tim Riset *Palm Oil Agribusiness Strategic Institute* (PASPI) <https://gapki.id/news/3209/sawit-dan-kebijakan-industrialisasi-sawit-menuju-2050>, diakses tanggal 11 Januari 2023 pukul 08.23 WIB

[https://one.oecd.org/document/GOV/PGC/SBO\(2018\)7/en/](https://one.oecd.org/document/GOV/PGC/SBO(2018)7/en/), diakses tanggal 24 Desember 2022 pukul 00:42 WIB

Idris Muhammad, “Ekspor Sawit ke Eropa Dihambat, Apa Dampaknya bagi RI?”, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3477946/ekspor-sawit-ke-eropa-dihambat-apa-dampaknya-bagi-ri>, diakses tanggal 12 Januari 2023 pukul 06.01 WIB

Idris, Muhammad, “RI Penghasil Sawit Terbesar Dunia, Tapi Harganya diatur Malaysia”, <https://money.kompas.com>, diakses tanggal 12 November 2022 pukul 04.45 WIB

Idris, Muhammad, “RI Penghasil Sawit Terbesar Dunia, Tapi Harganya diatur Malaysia”, <https://money.kompas.com>, diakses tanggal 12 November 2022 pukul 04.45 WIB

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, <https://kbbi.web.id/rugi>, diakses tanggal 28 Januari 2023 pukul 20.51 WIB

Kemenkeu, “Menteri Keuangan Republik Indonesia: Peningkatan Standar Layanan BLU, Wajah Profesional Pemerintah yang Hadir di Hadapan Rakyat”, <https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/nasional/2549-menkeu-peningkatan-standar-layanan-blu,-wajah-profesional-pemerintah-yang-hadir-di-hadapan-rakyat.html>, diakses tanggal 10 Januari 2023 pukul 08.03 WIB

Kemenkeu, 2016, “Menkeu: Peningkatan Standar Layanan BLU, Wajah Profesional Pemerintah yang Hadir di Hadapan Rakyat”, <https://djpb.kemenkeu.go.id>, diakses tanggal 10 Januari 2022 pukul 10.23 WIB

Mahkamah Agung, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeb354ecfec9b009f5c313730333337.html>, diakses tanggal 29 Maret 2023 pukul 08.23 wib.

Muchtar, Hardiwinoto, “Good Corporate Governance”, <https://hardiwinoto.com/good-government-governance/>, diakses tanggal 15 Januari 2023 pukul 08.17 WIB

Murdwarsa F., I Made, “Mengenal Sovereign Wealth Fund, Dana Investasi untuk Masa Depan Bangsa”, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-jakarta/baca-artikel/13654/Mengenal-Sovereign-Wealth-Fund-Dana-Investasi-untuk-Masa-Depan-Bangsa.html>, diakses tanggal 17 Januari 2023 pukul 08.40 WIB

Norges Bank Investment Management, 2022, “About the Fund”, <https://www.nbim.no/en/the-fund/about-the-fund/>, diakses tanggal 17 Januari 2023 pukul 10.19 wib

OECD, 2008, “Performance Budgeting: A Users, Guide, Policy Brief”, Paris: OECD Publishing, hlm. 2, <https://www.oecd.org/gov/budgeting/Performance-Budgeting-Guide>, diakses tanggal 24 Desember 2022 pukul 00.24 WIB

Pratama Huzaini, Moch Dani, “Problem Hukum Implementasi Doktrin *BJR* dalam Perkara Pidana”, <https://www.hukumonline.com>, diakses tanggal 17 November 2022 pukul 12.15 WIB

Ramadhan, Aditya, “Kontribusi Sawit terhadap Ekonomi dari Lapangan Kerja Hingga Ekspor”, <https://www.antaranews.com/berita/2348346/kontribusi-sawit-terhadap-ekonomi-dari-lapangan-kerja-hingga-ekspor>, diakses tanggal 23 Maret 2023 pukul 11.39 WIB

Raya Wawuru, Riki Perdana, 2017, Perluasan Ruang Lingkup Kerugian Immaterial, Kepaniteraan Mahkamah Agung RI, <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/artikel-hukum/1458-perluasan-ruang-lingkup-kerugian-immaterial-oleh-dr-riki-perdana-rayawawuru-s-h-m-h>, diakses tanggal 19 Februari 2023 pukul 05.55 wib

- Siaran Pers Kemenko Perekonomian, 2021, “Industri Kelapa Sawit Indonesia: Menjaga Keseimbangan Aspek Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan”, <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/2921/industri-kelapa-sawit-indonesia-menjaga-keseimbangan-aspek-sosial-ekonomi-dan-lingkungan>, diakses tanggal 11 Januari 2023 pukul 17.41 WIB
- Sri Sayekti, Ignatia M, “*Unrealized Loss* Dalam Investasi Saham”, <https://www.analisis.kontan.co.id>, diakses tanggal 16 November 2022 pukul 22.44 WIB
- Velculescu, Delia, 2008, “Norway’s Oil Fund Shows the Way for Wealth Funds”, article Finance and Development by International Monetary Fund, July 2008, <https://www.elibrary.imf.org/downloadpdf/journals/023/0037/007/article-A010-en.pdf>, diakses tanggal 17 Januari 2023 pukul 08.50 WIB
- Wildan, Muhammad, “Akhirnya, Aturan Teknis PP Investasi Pemerintah Resmi Terbit”, <https://www.ekonomi.bisnis.com>, diakses tanggal 16 November 2022 pukul 21.00 WIB